

MANFAAT STUDI BAHASA DAN SASTRA JAWA KUNA DITINJAU DARI SEGI SEJARAH DAN ARKEOLOGI

oleh: Boechari*)

I.

Dalam pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 12 Juli 1975 Prof. Dr. A. Teeuw mengemukakan alasan-alasan mengapa studi dan penelitian bahasa dan sastra sangat penting pada masa sekarang ini. Terutama karena studi bahasa Jawa Kuna akan dapat membuka pintu bagi kita untuk memasuki khazanah kebudayaan Indonesia pramodern. Dan di antara para sarjana yang memperoleh manfaat dari studi bahasa dan sastra Jawa Kuna itu disebutnya para ahli purbakala dan ahli epigrafi.

Memang yang terpenting di antara sumber-sumber primer untuk penulisan sejarah kuna dan arkeologi Indonesia ialah prasasti dan naskah-naskah. Prasasti-prasasti yang berasal dari masa antara abad ke-V dan ke-XVI M. ada yang ditulis dalam bahasa Sansekerta, ada pula ditulis dalam bahasa Melayu Kuna, bahasa Bali Kuna, Sunda Kuna, tetapi sebagian terbesar ditulis dalam bahasa Jawa Kuna.¹ Sedang naskah yang diperlukan oleh para ahli arkeologi dan sejarah sebagian terbesar juga ditulis dalam bahasa Jawa Kuna. Tidak hanya naskah-naskah yang biasa disebut naskah kesusasteraan sejarah dan agama saja, yang dijadikan sumber, tetapi juga naskah-naskah jenis lain, seperti naskah tentang pemerintahan, naskah hukum, dan naskah-naskah yang berisi aturan tentang peri kehidupan berbagai golongan di dalam masyarakat. Hal itu disebabkan karena kecenderungan historiografi modern untuk tidak semata-mata mengungkapkan hal ihwal dalam lingkungan "tradisi besar", tetapi juga kejadian-kejadian di dalam lingkungan "tradisi kecil", dan untuk mengungkapkan segi-segi struktural di samping segi-segi prosessuil.²

Lain dari pada itu penerbitan naskah-naskah ceritera, kebanyakan dalam bentuk kakawin, bukannya tidak berguna bagi ahli sejarah kuna dan ahli arkeologi. Sebab di dalam naskah-naskah golongan ini se-

*) Paper ini dibawakan dalam Seminar Ahli-ahli Jawa Kuna di Denpasar pada tgl. 23 November - 1 Desember 1975. Dimuat di sini dengan persetujuan Ketua Panitia Seminar.

ring pula dijumpai keterangan sejarah, biasanya di dalam bagian *maṅgala* dan penutupnya.³ Sering pula dijumpai keterangan yang dapat digunakan untuk pentafsiran ikonografi.⁴ Di dalam kakawin kita dapatkan juga keterangan tentang tokoh raja yang ideal, tentang pemerintahan, tentang peri kehidupan di dalam lingkungan istana dan para bangsawan yang lain, dan tentang kehidupan rakyat.⁵ Dan isi ceritera kakawin dapat membantu para ahli arkeologi dalam menafsirkan relief candi.⁶

Tetapi sayang sekali bahwa hingga kini baru sebagian saja, kalau tidak boleh dikatakan sebagian kecil, dari berbagai macam sumber itu yang telah diterbitkan. Sekedar untuk memberi gambaran dapat disebutkan di sini bahwa dari 290 prasasti bertarikh yang disebut di dalam daftar L.C. Damais (Damais, 1952) baru 81 yang terbit lengkap dengan terjemahan dan tafsirannya, 134 terbit dalam transkripsi sementara, sedang 75 belum diterbitkan sama sekali. Prasasti-prasasti yang tidak bertarikh dan bagian-bagian prasasti yang tidak lengkap juga banyak yang belum diterbitkan.⁷ Perlu disebutkan di sini bahwa di masa yang lalu hanya terdapat satu nama bangsa Indonesia yang produktif di antara nama-nama yang menerbitkan prasasti, yaitu almarhum Prof. Dr. Poerbatjaraka.⁸

Saya tidak sempat menghitung berapa jumlah naskah berbahasa Jawa Kuna yang ada dalam berbagai koleksi di dalam maupun di luar negeri. Saya persilakan yang berminat menghitung sendiri dalam karya Dr. Th. G. Th. Pigeaud (Pigeaud, 1970). Di sini saya ingin menekankan bahwa dari sekian banyak naskah itu baru sebagian kecil juga yang telah diterbitkan. Seri Bibliotheca Javanica yang diasuh oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jakarta hanya sempat menerbitkan 7 naskah.⁹ Ada juga naskah-naskah yang terbit di dalam seri Verhandelingen van het Bat. Gen.¹⁰ Koninklijk Instituut voor Taal -, Land - en Volkenkunde di Leiden menerbitkan juga beberapa naskah dalam seri Verhandelingen van het Koninklijk Instituut, dan dalam seri baru, yaitu Bibliotheca Indonesica, yang tidak mengkhususkan diri pada naskah-naskah berbahasa Jawa Kuna.¹¹ Majalah yang diasuh oleh kedua badan tersebut, yaitu Tijdschrift van het Bat. Gen. dan Bijdragen van het Kon. Inst. ada pula memuat penerbitan beberapa naskah.¹² Lain dari pada itu ada naskah-naskah yang terbit lepas dari sesuatu seri, baik sebagai disertasi

maupun sebagai penerbitan biasa.¹³ Belakangan ini di India muncul kegiatan untuk menerbitkan naskah-naskah berbahasa Jawa Kuna.¹⁴

II

Karena masih amat kurangnya naskah yang telah diterbitkan, dibandingkan dengan yang belum, maka kamus-kamus bahasa Jawa Kuna yang ada masih jauh dari memuaskan. Kita baru memiliki kamus Juynboll (Juynboll, 1923) dan kamus van der Tuuk (van der Tuuk, 1897 — 1912). Dapatlah difahami mengapa dalam tiap penerbitan prasasti dan naskah Jawa Kuna yang disertai terjemahan selalu masih terdapat kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang belum dapat ditafsirkan dengan memuaskan.

Untuk membatasi pada bidang saya sendiri, dapatlah sebagai contoh disebutkan di sini betapa masih sulitnya merekonstruksikan struktur birokrasi kerajaan-kerajaan kuna di Jawa, karena masih banyak istilah-istilah nama jabatan, mulai dari jabatan para pejabat tinggi kerajaan sampai kepada jabatan para pejabat desa, yang belum diketahui dengan tepat pengertiannya.

Di dalam prasasti kerajaan Mataram dijumpai nama-nama jabatan *rakryān mapatih i hino*, *rakryān mapatih i halu*, *rakryān mapatih i sirikan*, *rakryān mapatih i wka*, *sangāt bawang*, *sangāt tiruan*, *sangāt manghuri*, *rake halaran*, *rake palarhyang* atau *paṅgilhyang*, *rake wlahan*,¹⁵ *sangāt dalinan*, *pangkur*, *tawān*, *tirip*, *sangāt lampi*, *sangāt wadihati* dan *sangāt makudur*.

Dari penelitian penelitian dapat disimpulkan bahwa *rakryān mapatih i hino*, *i halu* dan *i sirikan* ialah putra-putra raja dari *parameswari* yang membantu dalam pemerintahan sebagai "raja muda", dan mempunyai hak untuk menggantikan duduk di atas takhta kerajaan (Boechari, 1965; 1968). Bahwa *rakryān mapatih i kwa* atau *rake wka* juga putra raja dapat disimpulkan dari arti kata *wka*, yaitu anak. Tetapi apakah sama derajatnya dengan *hino*, *halu* dan *sirikan*? Ataukah ia anak dari selir? Dan apakah arti kata *hino* dan *sirikan*? Kata *halu* sering diganti dengan *watu tihang* atau *wungkal tihang*, jadi ia berarti "tiang batu." Tetapi apakah hubungan "tiang batu" itu dengan kedudukan pemakai gelar?¹⁶

Kata *samgat* merupakan singkatan dari *sang pamgat*, yang merupakan gelar keagamaan. *Samgat tiruan* dan *samgat manghuri* akan dijumpai dalam jaman Majapahit sebagai *upapatti*, yaitu pejabat kehakiman. Menurut kitab *Nāgarakṛtāgama* jumlah *upapatti* ada tujuh.¹⁷ Tetapi apakah di dalam jaman Mataram, kuna *samgat tiruan* dan *samgat manghuri* juga pejabat kehakiman?

Sekalipun arti kata *paṅgilhyang* atau *palarhyang* diketahui, yaitu "memanggil dewa, mencari dewa atau mengharapkan dewa", kita tidak tahu dengan pasti apa kedudukannya di dalam hirarki pemerintahan. Dari arti katanya dapat dikirakan bahwa *paṅgilhyang* berhubungan dengan upacara keagamaan. Tetapi mengapa ia bergelar *rakai*, yang biasanya dipakai oleh penguasa daerah, bangsawan dan pejabat sipil?

Jabatan yang menarik perhatian ialah *paṅkur*, *tawān* atau *haññian*, dan *tirip*. Jabatan-jabatan itu sudah disebut di dalam prasasti Kalasan tahun 700 Çaka yang berbahasa Sansekerta (Brandes, 1886; Bhandarkar, 1887; Bosch, 1928), dan masih juga muncul di dalam prasasti prasasti jaman Majapahit, antara lain di dalam prasasti Pamintihan tahun 1385 Çaka (Bosch, 1922). Di dalam prasasti Kalasan itu *paṅkur*, *tawān* dan *tirip* disebut juga *ādeçaçastrin*, *deçādhyakṣa* dan *ma-hāpuruṣa*,¹⁸ sedang di dalam prasasti-prasasti sejak jaman pemerintahan Pu Dakṣa sampai dengan jaman Majapahit ketiga pejabat itu hampir selalu disebut di antara pejabat-pejabat yang tidak boleh lagi memasuki "daerah perdikan", dan sering diterangkan dengan *sang māna katrīṇi*. Dengan alasan-alasan yang terperinci J.G. de Casparis sampai kepada kesimpulan bahwa *paṅkur*, *tawān* dan *tirip* ialah pejabat-pejabat kerajaan yang tugas pokoknya ialah melakukan pengawasan agar perintah raja dilaksanakan (Casparis, 1956, hlm. 220--221).

Yang agak jelas tugasnya ialah *sang pamgat wadihati* dan *sang pamgat makudur*. Di dalam berbagai prasasti kedua *pamgat* itu selalu bertindak sebagai pemimpin upacara penetapan "daerah perdikan" (*sīma*), dengan *sang pamgat makudur* sebagai orang yang mengucapkan sumpah (*çapatha*) sambil memotong leher ayam dan membantingkan telur di atas *watu sīma*. Menurut Prof. Poerbatjaraka *makudur* memang berarti "mengutuk", tetapi apakah arti kata *wadihati*, yang ternyata mempunyai sinonim *ayam tēas*? Tentang jabatan-jabat-

an yang lain tidak ada keterangan yang dapat membayangkan kedudukan dan tugas mereka di dalam pemerintahan.

Prasasti-prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwani (856 – 883 M.) dan Rakai Watukura (901 – 910) memberikan macam-macam jabatan pejabat desa (*rāma māgman* atau *mañagam kon*), antara lain *patih*, *kalang*, *gusti*, *kalima*, *wariga*, *winkas*, *tuha wanua*, *tuhālas*, *tuha buru*, *tuha wērēh*, *hulair*, *hulu wuattan*, *hulu kuwu*, *hulu wras*, *mapkan*, *makajar*, *matamān*, *matamwak*, *mañatag*, *manapal*, *menuñgū*, *matanḍa*, *matahun*, *makalangkang*, *makulak*, *mawatas*, *mula*, *wadahuma*, *parujar* atau *parwuwus* dan *pitungtung* atau *pihujung*.

Beberapa di antaranya dapat diketahui artinya, dan dapat dikira kirakan apa tugasnya. Misalnya saja *hulair* atau *huluair*, ialah pejabat desa yang mengurus saluran air untuk pengairan, semacam "mantri ulu-ulu", *tuhālas* kiranya dapat dipersamakan dengan "mantri kehutanan", *tuha buru* masih dijumpai dalam istilah "tuwaburu", *makalangkang* mungkin sekali pejabat yang mengurus lumbung desa, *wariga* ialah ahli ilmu falak yang bertugas mencari hari baik bulan baik bagi bermacam-macam pekerjaan di desa,¹⁹ *mapkan* mungkin semacam "mantri pasar". Tetapi apakah *kalang* juga semacam "wong kalang" dari jaman kemudian?²⁰ Dan apakah tugas seorang *winkas*, seorang *parujar*, dan seorang *pitungtung*, misalnya, sekalipun kita tahu arti katanya. Dan yang menarik perhatian ialah jumlah pejabat desa yang sebanyak itu. Berapakah luas suatu *wanua*? Dan berapa jumlah penduduk suatu *wanua*, sampai perlu diurus oleh sekian banyak pejabat?

Kita mengenal lebih dari duaratus nama jabatan yang termasuk di dalam kelompok *mañilāla drawya haji*, yaitu sekelompok pejabat yang dikatakan "tidak boleh lagi memasuki daerah perdikan". Di dalam berbagai prasasti kalimatnya berbunyi: *parñnah nya swatantrā tan katamāna de ni winawa sang māna katrīni. pangkur. tawān. tirip. ñuniweh saprakāra sang mañilāla drawya haji. wulu wulu magēṅ madmit makadi miçra para miçra*,²¹ diikuti oleh daftar para *mañilāla drawya haji* itu.

Variasi yang lain berbunyi: *paknā nya swatantrā tan katamāna de ni patih wahuta rāma nāyaka ya samgat. ñuniweh saprakāra ning mañilāla drawya haji ring dañū. miçra para miçra wulu wulu prakāra*.²² Perumusan yang lebih panjang kita dapatkan di dalam prasasti Tu-

hanyaru yang berangka tahun 1245 Çaka (OJO., LXXXIII; Sarkar, 1935): *kuněng tingkah nika kalih. kewala sīmā swatantrādēgrīngit tan kolahulaha de sang prabhu mantryanāgata. tke dlāha. muang tan kaparabyāparā de ning nāyaka parttaya. tan knang turunturun sagēm sarakut. bwathajyan agēngadmit lakwa lakwan adoh aparē. muang tan katamāna de ni winawa sang māna katrīṇi. lwir nya. paṅkur. (tawān). tirip. muang pinghe wahuta rāma. lāwan sakweh ning maṅilāla drawya haji. wulu wulu para wulu agēng admit. makāding miçra para miçra*, yang disusul oleh daftar para *maṅilāla drawya haji*.

Prasasti Cane menyebut 104 jabatan *maṅilāla drawya haji*, ialah:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. paṅurang | 2. kring |
| 3. paḍēm (apuy) | 4. manimpiki |
| 5. paranakan | 6. limus galuh |
| 7. maṅriṅca | 8. manghuri |
| 9. parang | 10. sungka |
| 11. dhūra | 12. taji |
| 13. watu tajēm | 14. sukun |
| 15. halu warak | 16. rakasang |
| 17. ramanang | 18. pinilai |
| 19. katanggaran | 20. tapa haji |
| 21. air haji | 22. malandang |
| 23. lca | 24. lablab |
| 25. pakalangkang | 26. kutak |
| 27. tangkil | 28. tṛpan |
| 29. salyut | 30. watu walang |
| 31. pamaṅikan | 32. maṅiga |
| 33. sikpan | 34. rumban |
| 35. tirwan | 36. wilang thāni |
| 37. wiji kawah | 38. panggare |
| 39. pawlangwang | 40. papikul awur |
| 41. pawuwuh | 42. pakatiwārṣa |
| 43. porug | 44. patung |
| 45. pakikis | 46. pasumbu |
| 47. tingkēs | 48. māwi |
| 49. manambaṅi | 50. taṅhiran |
| 51. tuha dagang | 52. juru goçali |
| 53. maṅrumbe | 54. maṅguṅje |

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 55. ser | 56. tuha nambi |
| 57. juru kling | 58. juru huñjman |
| 59. juru juđi | 60. juru jalir |
| 61. pabisar | 62. pagulung |
| 63. pawung kunung | 64. pulung pađi |
| 65. miçra hino | 66. micrāninañin |
| 67. wli hapū | 68. wli wadung |
| 69. wli harēng | 70. wli pañjut |
| 71. palamak | 72. pakalungkung |
| 73. urutan | 74. dampulan |
| 75. pasukalas | 76. sungsung pañurang |
| 77. tpung kawung | 78. sipat wilut |
| 79. jungkung | 80. pāñinañin |
| 81. pamāwaçya | 82. hopan |
| 83. panrāñan | 84. skar tahun |
| 85. garihan | 86. parāma |
| 87. pabaye | 88. sinagiha |
| 89. panlung blah | 90. panlung atak |
| 91. tampě sisir | 92. pobhaya |
| 93. pacumbi | 94. paprayaçcita |
| 95. kđi | 96. walyan |
| 97. pawuruk | 98. sambal |
| 99. sumbul | 100. hulun haji |
| 101. jēngi | 102. singgah |
| 103. pamrēsi | 104. pawulung wulung |

Daftar itu masih dapat ditambah dengan mengambil bahan dari prasasti-prasasti yang lain, ialah:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 105. juru kutak | 106. unđahagi |
| 107. pañaruhan | 108. pañde |
| 109. mapayuhan | 110. widu |
| 111. mañidung | 112. juru pađahi |
| 113. burahan | 114. mahaliman |
| 115. rakadut | 116. wli tambang |
| 117. turun turun | 118. panusuh |
| 119. arawanasta | 120. kapur (?) |
| 121. udānan (?) | 122. uparan (?) |
| 123. patunđan | 124. sahiran (tanghiran?) |

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 125. kukap | 126. anusung |
| 127. patanah | 128. pahasangsē (?) |
| 129. kipah pari kipah | 130. pakalingking |
| 131. panungsung | 132. tuha labuhan |
| 133. karēngrēnan | 134. patatar |
| 135. parājadala | 136. pagarakapan |
| 137. pawdihan | 138. pamahat |
| 139. manglaka | 140. pasañani (?) |
| 141. patangkalan | 142. kyāb |
| 143. liñgang | 144. hidyasāri |
| 145. juru niga | 146. pagiyañan |
| 147. sṛkan (sṛtan?) | 148. albuḥ |
| 149. mati kalbu | 150. wurisiki |
| 151. lañcang | 152. kanāyakan |
| 153. akurēban | 154. pakbo |
| 155. pahawuhawu | 156. pālih kuwu |
| 157. pakatimang | 158. paririlañit |
| 159. paḍawuturus | 160. sandang lamur |
| 161. manghwan | 162. haturan bāng |
| 163. haturan pādu | 164. mamanah |
| 165. magalah | 166. magaḍi |
| 167. matēñrān | 168. makuda |
| 169. pawalakasan | 170. pakarapan |
| 171. panghayapan | 172. pañuruñan |
| 173. pañalasan | 174. pamanukan |
| 175. pasugalan | 176. alawa |
| 177. panatah | 178. pañramaning awur |
| 179. tikēlañgas | 180. pawalanda |
| 181. sungging | 182. juru barata (barat?) |
| 183. juru tēgēl | 184. juru cina |
| 185. pinta palaku (?) | 186. sakupang sātak (?) |
| 187. pawḍus | 188. pasāmbang |
| 189. papuyuh | 190. padahut |
| 191. pangpang | 192. para(ra)jēg |
| 193. paçimçim | 194. pajle |
| 195. patlung kupang | 196. panakupang |
| 197. pujut | 198. bhonḍan |
| 199. paḍak | 200. wwal |

201. wungkuk	202. pañuněnan
203. pakatimang	204. pakuwañi
205. tutan	206. pacandana
207. juru rahasya	208. pālih tuwuh (kuwu?)
209. padwa mas	210. patitis (pakikis?)
211. pawlit	212. poh galuh

Istilah *mañilāla drawya haji*, dengan sinonimnya *maminta drawya haji*, dan keterangan bahwa mereka itu tidak boleh lagi memasuki suatu daerah perdikan, sepintas lalu memang memberi kesan bahwa mereka itu ialah pemungut-pemungut pajak. Tetapi Stutterheim pernah mengajukan pendapat bahwa gambaran seperti itu tidak seluruhnya benar (Stutterheim, 1925). Sepanjang arti katanya dapat diketahui, jelas bahwa sebagian dari *mañilāla drawya haji* itu ialah "abdi dalem kraton", yang tidak mempunyai "daerah lungguh", sehingga hidupnya tergantung dari "gaji" yang diambil dari perbendaharaan kerajaan (*drawya haji*).

Istilah yang membawa ke kesimpulan demikian itu antara lain ialah *hulun haji* dan *watěk i jro* (= abdi raja dan golongan dalam). Menurut hemat kami istilah "golongan dalam" harus ditafsirkan sebagai "abdi dalem yang tinggal di dalam lingkungan tembok kota" (*jeron beteng*), termasuk yang ada di dalam lingkungan tembok istana. Termasuk di dalamnya antara lain *juru padahi* (= penabuh gamelan), *widu*, *mañidung* (= pesinden), *arawanasta* (= penari?), yang dijumpai juga dalam bentuk *rāwanahasta*; kelompok yang mungkin dapat disamakan dengan "abdi dalem palawija", seperti *pujut* (orang yang mempunyai suatu cacad jasmaniah?), *jěngi*, *bhoñdan* (= budak budak berkulit hitam), *pañdak* (orang pendek, cebol), *wwal* atau *wyal* atau *wěal* (orang berpunuk), dan *wungkuk* (orang bongkok); abdi dalem penyongsong (*mapayunān*), dan anggota pasukan pengawal istana yang bersenjatakan panah, tombak dan bindi (*mamanah*, *magalah* dan *magañdi*). Mungkin istilah-istilah yang berikut ini juga masih tergolong *watěk i jro*, yaitu *pañdai (mas)*^{2 3} (= abdi dalem kemas), *paçimçim* (= pembuat cincin), *pawđihan* dan *mañlāka* (= pembatik dan tukang soga),^{2 4} *pamahat*, *panatah*, *suñging* (= pemahat, penatah (wayang?)), dan juru sungging), *pahaliman* atau *pahasti* dan *pakuda* (= abdi dalem yang mengurus gajah dan kuda).^{2 5}

Tetapi apakah *manambañi* seorang pejabat "pemerintahan pusat" yang tinggal di ibukota, yang bertugas mengawasi dan mengurus semua tempat-tempat penyeberangan di seluruh kerajaan, atau orang-orang yang melayani perahu penyeberangan? Dalam hal yang terakhir *manambañi* tidak dapat kita golongankan *watēk i jro*.²⁶ Demikian pula halnya dengan *wilang thāni* atau *wilang wanwa*. Apakah ia petugas yang harus berkeliling menghitung jumlah desa dan tanah-tanah yang dapat dibebani pajak, ataukah ia pejabat istana yang hanya mendaftarkan jumlah desa, termasuk jumlah penduduknya, dan tanah-tanah yang dapat dibebani pajak yang diterima dari para penguasa daerah?²⁷

Beberapa di antara nama jabatan itu terang berhubungan dengan masalah pajak, seperti yang dapat disimpulkan dari berbagai prasasti. Misalnya di dalam prasasti Hantang yang bertarikh 1057 Çaka (OJO., LXVIII) dapat dibaca: B.2. *ri tan knanya ring drabya haji wulu wulu saprakāra* *tan kna ri malandang pakrang pakring* 6. *tan knā ring tañhirañ. tan knā (7) ri pana-giha. tan knā ri salyut. tan knā ri manimpiki. tan knā ri mañhuryāñi-lala*

Agak berlainan masalahnya apabila kita berhadapan dengan istilah-istilah yang termasuk ke dalam *sukhaduhkha*. Prasasti-prasasti memberikan pembacaan yang hampir bersamaan, yaitu: *samangkana ikang sukhaduhkha kadyāñga ning mayang tan pawwah. walū rumambat ing natar. wipati wañkai kabūnan. rāh kasawur ing natar. dūhilatēñ. hidu kasirat. sūhasa. hastacapala. wākcapala. mamijilakēñ wuri ning kikir. mamūk. mamumpang. lūdan. tūtan. añça pratyañça. danda kudanda. mañdihalādi prakāra*

Di sini istilah-istilah itu diketahui arti katanya. Tetapi tanpa bantuan naskah-naskah hukum barangkali kita tidak akan dapat menangkap makna yang sebenarnya. *Sukhaduhkha* bukanlah "suka dan duka", melainkan diterangkan dengan *hala hayu*, ialah segala perbuatan yang buruk dan yang baik yang terjadi dalam masyarakat, atau seperti yang dimaksudkan di dalam setiap prasasti, yang terjadi dalam lingkungan daerah perdikan. Bahkan sebenarnya hanya perbuatan yang jahat saja yang dimaksudkan. Dengan perkataan lain, *sukhaduhkha* ialah segala tindak pidana (yang terjadi di dalam lingkungan daerah perdikan) yang harus dikenai hukuman denda.

Istilah *wañkai kabūnan*, yang berarti "mayat yang terkena embun", mendapat penjelasan yang cukup panjang di dalam naskah Āgama (Jonker, 1885, hlm. 49, ps. 66), yaitu: *wañke ginēnah de ning duṣṭa amateni wong ring deṣa ning adeṣa kala ning whi. nora wēruh kang adrēwe Imah dēṇḍa nikang adrēwe Imah. yen mulat mnēng dene kasalahan wañke yen kawēnen ikang wañke dēṇḍane rong lakṣa de nira sang amawa bhumi. sapakaramane milu kadēṇḍa. arane katmu wañke kabūnan.*²⁸

Di dalam naskah Sārasamuccaya terdapat keterangan yang lebih singkat: *hana wwang mati. tan kinawruhan kapatinya. de sang rama. sang rama tan apasaduwa. sang rama daṇḍa ḥu 1 ma 4. wañke kabūnan haranya.*²⁹

Istilah lain yang diketahui maknanya dari naskah-naskah hukum antara lain ialah *wākcāpala*, yang di dalam naskah Āgama disebut *wākcparuṣya*, dengan arti *añuman uman* (= memaki maki)³⁰ *mamumpang* diketahui artinya dari naskah Kuṭāra Āgama dan Pūrwwa Āgama sebagai "memperkosa wanita", *mamijilakēn wuri ning kikir* dijumpai di dalam naskah Sārasamuccaya sebagai *mamijilakēn sañjata*. Tetapi istilah *mayang tan pawwah* atau *mayang tan tka ring wwah*, yang arti katanya "bunga pinang yang tidak (sampai) menjadi buah", dan istilah *walū rumambat ing natar*, yang berarti "waluh yang menjalar di halaman", belum diketahui maknanya. Mungkin penerbitan naskah-naskah hukum yang lain, yang masih banyak jumlahnya, dapat membantu kita.

• Memang masih banyak sekali kesulitan yang dihadapi para ahli sejarah yang menggunakan prasasti sebagai sumbernya. Banyak kata-kata yang maknanya lain dari arti katanya secara harfiah. Sebagai contoh dapat disebutkan di sini kata *pinghe* dan *wārggāpinghe*. *Pinghe* berarti putih, sehingga Pigeaud menyalin kata *wārggāpinghe* dengan "kaum kaputihan" atau "kaum agama", karena ia menghubungkannya dengan "kaputihan" dan "abangan" dalam masyarakat Islam (Pigeaud, 1960/62, III, hlm. 149; IV, hlm. 385; 468).³¹

Tetapi pengamatan yang lebih teliti atas prasasti-prasasti menunjukkan bahwa *pinghe* dipakai sebagai sinonim dari *patih*. Di dalam prasasti Añjukladang yang berangka tahun 857 Ḥaka (OJO., XLVI) kita baca: A.3. *ājña ḥri mahārāja pu siṇḍok* *tiṇḍah rakyrān mapinghe kālih ra (4) ke hino pu sahasra. raka wka pu baliwara.*, sedang dari prasasti-prasasti lain kita tahu bahwa gelar *hino*

dan *wka* biasanya didahului kata *rakryān mapatih*.³² Di dalam prasasti Hring tahun 869 Çaka (OJO., XLVII) dan beberapa prasasti yang lain³³ dapat dibaca: B.36. *tan kolahulaha de sang anāgata prabhu mwang pinghe wahuta rā* (37) *ma nāyaka partaya*., sedang di dalam prasasti Cuñgrang tahun 851 Çaka (OJO., XLI; Stutterheim, 1925) dan beberapa prasasti yang lain³⁴ kita jumpai: A.12. *swatantrā tan parabyāparan de ning patih* (13) *wahuta rāma nāyaka partaya pañurang*. Di dalam prasasti Paradah tahun 865 Çaka (OJO., XLVIII) kita jumpai kata *wārggāpinghe*, sedang di dalam prasasti Kamalagyan tahun 859 Çaka (OJO., LXI; Soetjipto Wirjosoeparto, 1958) kita jumpai *wārgga patih* dalam konteks yang sama.

Dapat dikirakan bahwa sebelum jaman Singhasāri – Majapahit *rakryān mapatih i hino* dijabat oleh putra mahkota (Boechari 1965; 1968). Dalam jaman Singhasāri – Majapahit itu *rakryān mapatih* ialah pejabat yang tertinggi di antara para *taṇḍa rakryān ring pakirakirān*, dan dalam beberapa naskah disebut *patih amangkubhūmi*. Di dalam wilayah *watak* dan di dalam *wanua* ada juga pejabat yang bergelar *patih*. Jelaslah bahwa *wārggāpinghe* bukan kaum agama.

Contoh yang lain ialah kata *gunting* di dalam prasasti. Di dalam prasasti-prasasti yang berisi pemberian anugerah raja kepada seseorang yang telah berjasa sering kita jumpai pemberian hak-hak istimewa di samping anugerah *sīma*. Di antara hak-hak istimewa itu terdapat *wrang angunṭiṇe ruhur bale*, yang oleh Pigeaud disalin dengan "they have the right to have a pair of scissors (of wood or bamboo as an ornament) on top of their *bale* (pavilion)" (Pigeaud, 1960/62, II, hlm. 148). Jadi Pigeaud ingat akan "gunting" dalam pengertian jaman sekarang. Tetapi rupa-rupanya ia sendiri tidak yakin akan terjemahannya itu, sehingga ia menambahkan keterangan "dibuat dari kayu atau bambu sebagai perhiasan." Meskipun demikian ia ingin konsekwen kepada gambaran "gunting" dalam pengertian jaman sekarang, dan menterjemahkan *wḍus gunting*, sejenis *rājamañça* (= daging khusus untuk raja) yang kemudian boleh juga dimakan oleh orang yang mendapat anugerah raja itu, dengan "cut ram."

Terlepas dari masalah bahwa apabila kita mau mempertahankan terjemahan "cut ram" itu bentuk Jawa Kuna-nya seharusnya *wḍus ginunting*, ternyata bahwa di sini pun Pigeaud kurang teliti seperti waktu menterjemahkan kata *pinghe*. Kalau kita teliti prasasti-prasasti

yang lain kita akan melihat bahwa sebenarnya kalimat *wnang aṅguntiṇe ruhur bale* itu tidak lengkap, tidak ada obyeknya, dan obyek itu biasanya *rarai* atau *kawula*.

Di dalam prasasti Gandhakuti tahun 964 Çaka (OJO., LXIII) terdapat *wnang aṅgunting rarai ring palaṅka sūsun binubut*. Akan tidak masuk akal kalau kalimat itu disalin dengan "berhak memotong" (ingat "cut ram") anak di atas "dipan" susun yang dibubut". Dan jika kita salin dengan "berhak menggunting anak" apanya yang digunting? Rambutnya? Apakah menggunting rambut anak di atas "dipan" susun yang dibubut itu merupakan hal yang hanya boleh dikerjakan oleh raja?^{3 5}

Kesulitan yang lain disebabkan karena hingga kini tata bahasa-bahasa Jawa Kuna belum digarap dengan selengkap-lengkapnyanya. Yang dapat dipakai sebagai pegangan barulah H. Kern: *Bijdragen tot de spraakkunst van het Oud-Javaansch*, C.C. Berg; *Inleiding tot de studie van het Oud-Javaansch*, dan Zoetmulder: *De taal van het Adiparwa*. Ketiga-tiganya tidak menggunakan bahan bahasa prasasti. Susunan kalimat di dalam prasasti, terutama prasasti Jawa Kuna yang tertua, seperti prasasti dari masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwani, agak berbeda dengan susunan kalimat di dalam kesusasteraan. Di dalam prasasti-prasasti Jawa Kuna yang tua itu kalimat dibuat sesingkat-singkatnya, dengan mengurbankan kejelasan, dan susunan bagian-bagian kalimat sering dibalik-balik.

Sebagai contoh kita kutipkan di sini kalimat dalam prasasti Taragal tahun 802 Çaka: I a.9.// *wahuta hyang tumut manusuk pagarwsi si wahu. kudur tumut manusuk halantaṅan si mani. mas ma 4 wḍihan aṅsit yu 1 soang* // kalau mau disalin ke dalam bahasa Indonesia maka kalimat itu harus ditambah supaya jelas, menjadi: // *wahuta hyang (kudur anung) tumut manusuk (wahuta hyang kudur i) pagarwsi(manaran)si wāhu. (wahuta hyang) kudur (anung) tumūt manusuk (wahuta hyang kudur i) halantanan (manaran)si mani. (kapwa winaihan pasak pasak) mas mā 4 wḍihan aṅsit yu 1 soang* // Kalimat yang kedua itu dapat juga dipersingkat menjadi: *mwang wahuta hyang kudur i halantaṅan maṅaran si māni*.

Contoh bagian-bagian kalimat yang dibalik-balik: Prasasti Humandṅing tahun 797 Çaka dan prasasti Mulak tahun 800 Çaka: *anung inaṅsēan pasak pasak wyawasthāning manusuk sīma* // *sangat wadihati pu managih sisim pasada woh 1 wrat mā 8 wḍihan aṅsit yu*

1 Di dalam prasasti Haliwangbang tahun 799 Çaka kalimat itu berbunyi: *wyawasthā ning manusuk inangsēan sang pamgat wadhati pu manuduk wdihan aṅsit yu 1 mas mā 8*. Sedang di dalam prasasti Taragal tahun 802 Çaka kalimat itu berbunyi: *inangsēan sang pamgat wadhati pu manu pasēk pasēk wyawasthā ning manusuk sīma, mas mā 8 wdihan pilih aṅsit yu 1*. Bagaimanakah posisi *wyawasthā ning manusuk*? Adakah ia merupakan keterangan bagi *sang pamgat wadhati* (dan pejabat-pejabat lain yang disebut di belakangnya), atau keterangan bagi *pasak pasak*?³⁶

III.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kami yang berkecimpung dalam penelitian sejarah kuna dan arkeologi Indonesia masih amat banyak memerlukan bantuan para ahli bahasa Jawa Kuna. Pertama-tama hendaknya diusahakan penerbitan naskah-naskah Jawa Kuna sebanyak-banyaknya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang terpenting bagi kami tentulah naskah-naskah sejarah, seperti Kidung dan Usāna, naskah-naskah tentang pemerintahan dan aturan bagi berbagai golongan masyarakat, yaitu naskah-naskah yang tergolong Nīti, seperti Praya, Nīti Rājaçāsana, dll., naskah-naskah hukum (*cāsana* dan *āgama*), naskah kesusasteraan agama yang meliputi *tutur*, naskah yang berisi aturan tentang upacara keagamaan dan saji-sajian, tentang pemujaan terhadap dewa-dewa, dan naskah-naskah tentang arsitektur.³⁷ Setelah cukup banyak naskah dari berbagai jenis yang diterbitkan, perlu disusun tata bahasa yang lengkap. Perlu juga dipikirkan penyusunan kamus, melengkapi kamus yang sedang disusun oleh Prof. Zoetmulder, sebab beliau belum menggunakan berbagai jenis naskah.

Di atas telah dikatakan bahwa hingga kini hanya seorang saja bangsa kita yang produktif dalam menerbitkan naskah-naskah Jawa Kuna, yaitu almarhum Prof. Poerbatjaraka. Yang berkecimpung dalam bidang ini kebanyakan bangsa asing. Tidakkah hal itu menggugah hati kita sekalian? Apakah kita, keturunan langsung dari mereka yang menghasilkan kesusasteraan Jawa Kuna itu, harus selalu belajar dari bangsa asing tentang warisan budaya nenek moyang kita sendiri?

Sebenarnya kita harus berkeyakinan bahwa kita yang masih menggunakan bahasa yang merupakan kelanjutan dari bahasa Jawa Kuna mempunyai kelebihan dari bangsa asing, terutama dalam hal "perasaan bahasa" (Zoetmulder, 1974, hlm. 62), sehingga kalau kita mau memberikan pengabdian kepada studi bahasa dan kesusasteraan Jawa Kuna, kita pasti memperoleh hasil yang lebih baik dari bangsa asing mana pun.

Catatan :

- 1) Untuk memperoleh gambaran tentang perbandingan penggunaan bahasa di dalam prasasti-prasasti, lihat daftar prasasti dalam karya L.C. Damais (Damais, 1952; 1970).
- 2) Istilah "great tradition" dan "little tradition" untuk menyebut lingkungan kraton dan lingkungan rakyat biasa itu dilancarkan oleh R. Redfield (Redfield, 1956).
- 3) Di dalam karyanya yang baru terbit Zoetmulder sengaja memberikan *mañgala* dan penutup berbagai kakawin (Zoetmulder, 1974).
- 4) Sebagai contoh dapat disebutkan karangan Prof. Soetjipto Wirjosoeparto tentang ikonografi Ganeša berdasarkan keterangan di dalam kitab Smaradahana (Soetjipto Wirjosoeparto, 196.).
- 5) Sudah barang tentu kita harus berhati-hati dalam menggunakan sumber kesusasteraan untuk merekonstruksikan segi-segi struktural sejarah Indonesia kuna. Terjemahan secara harfiah dari kesusasteraan India tentu tidak dapat dipakai. Baru setelah dari penelitian diketahui ada bagian-bagian yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Jawa, atau ada sisipan yang tidak diambil dari sesuatu naskah di India sehingga dapat diperkirakan bahwa sisipan itu menggambarkan keadaan di Jawa, maka kita dapat menggunakan keterangan dalam bagian bagian itu. Dr. C. Hooykaas telah mengadakan studi yang mendalam tentang kitab Rāmāyāna Kakawin, dan dapat mengidentifikasi bagian bagian yang merupakan sisipan (Hooykaas, 1955; 1958).
- 6) Sebagai contoh dapat disebutkan di sini identifikasi relief pada terras kedua Candi Panataran oleh P.V. van Stein Callenfels atas dasar ikhtisar isi naskah Kṛṣṇāyāna yang dibuat oleh Poerbatjaraka (Stein Callenfels dan Poerbatjaraka, 1916). Kerjasama antara keduanya menghasilkan pula identifikasi relief pada terras kedua Candi Jago (Stein Callenfels dan Poerbatjaraka, 1919). Stein Callenfels sendiri mengerjakan naskah Sudamala dan mengidentifikasi relief pada Candi Tigawangi dan Sukung berdasarkan naskah tersebut (Stein Callenfels, 1925). W.F. Stutterheim telah membandingkan relief Rāmāyāna pada Candi Prambanan dan Candi Panataran dengan beberapa versi ceritera Rāmāyāna (Stutterheim, 1925).
- 7) J.W.M. Bakker, S.J. menyebutkan 702 prasasti di seluruh Indonesia, di antaranya 482 di Jawa (Bakker, 1972). Belum lama berselang telah terbit terjemahan ke dalam bahasa Inggris dari prasasti-prasasti di Jawa sampai masa pemerintahan Pu Siṅdok oleh H.B. Sarkar (Sarkar, 1971). Sayang Sarkar hanya mengutip transkripsi transkripsi yang ada saja, terutama transkripsi J.L.A. Brandes (Brandes-Krom, 1913) yang baru merupakan transkripsi sementara.
- 8) Keadaan sekarang agak menggembirakan karena telah ada beberapa orang ahli epigrafi bangsa kita, seorang di antaranya tidak akan kalah dengan Prof. Poerbatjaraka dalam hal produktivitas, yaitu Drs. M.M. Soekarto Kartoatmodjo. Bahkan beberapa sarjana lulusan IKIP Malang Jurusan Sejarah sekarang ini ada yang ikut menangani penerbitan prasasti, antara lain Drs. Moh. Oemar dan Drs. Issatryadi. Di Jurusan Arkeologi FSUI, FSGAMA dan FSUNUD ada beberapa mahasiswa yang mengambil Epigrafi sebagai mata kuliah khusus. Di FSUI mahasiswa Jurusan Sastra Jawa dianjurkan untuk mengikuti kuliah Epigrafi juga. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang berkembang menjadi ahli epigrafi yang baik.
- 9) Enam naskah yang terbit dalam seri ini ialah: Kidung Rangga Lawe (Berg, 1930), Tantri Kamandaka (Hooykaas, 1931), Smaradahana (Poerbatjaraka, 1931), Nīti-śāstra (Poerbatjaraka, 1933), Brahmāṇḍa Purāṇa (Gonda, 1932, 1933) dan Bhīṣmaparwa (Gonda, 1936, 1937). Jilid ke-9 dari seri ini berisi studi perbandingan dari beberapa ceritera Pañji (Poerbatjaraka, 1940), yang belum lama ini terbit salinannya ke dalam bahasa Indonesia.
- 10) Di dalam seri ini antara lain diterbitkan naskah Wṛttasañcaya (Friederich, 1849), Arjunawiwāha (Friederich, 1850), Bhomakawya (Friederich, 1852), Pararaton (Brandes, 1896; Brandes-Krom, 1920), Nāgarakṛtāgama (Brandes, 1902).

- 11) Di dalam seri Verhandelingen Kon. Inst. terbit a.l. Kidung Sorāndaka (van den Berg, 1939), Hariwañca (Teeuw 1950), dan Cantakaparwa (Ensink, 1967). Di dalam seri Bibliotheca Indonesia a.l. Ciwarātrikalpa (Teeuw et. al. 1969).
- 12) Di dalam B.K.I. terbit a.l. Kidung Sunda (Berg, 1927), Calon Arang (Poerbatjaraka, 1926a), Arjunawiwāha (Poerbatjaraka, 1926 b.), Kidung Harṣa Wijaya (Berg, 1931), Agastyaparwa (Gonda, 1936), dan Nirārtha Prakreta (Poerbatjaraka, 1951), dan di dalam T.B.G. a.l. Dampati Lalangon (I Wayan Bhadra dan Hooykaas, 1942).
- 13) Beberapa disertasi a.l. Tantu Panggëlaran (Pigeaud, 1924), Nawaruci (Prijoetomo, 1934), Korawaçrama (Swellengrebel, 1936), Sri Tañjung (Priyono, 1938), Bhoma-kāwya (Teeuw, 1948) dan Wirātapārwa (Fokker, 1948). Beberapa penerbitan yang lain a.l. Wrëttasañcaya (Kern, 1875), Açramawasanaparwa, Mosalapārwa dan Prasthānikapārwa (Juynboll, 1893), Bhāratayūddha (Gunning, 1903), Adiparwa (Juynboll, 1906), Ramayana Kakawin (Kern, 1900, 1917; Juynboll, 1922-1936), dan Sang Hyang Kamahayanikan (Kats, 1910 ; Wulff, 1935).
- 14) Antara lain yang terbit dalam rangka ini ialah Çlokāntara (Sharada Rani, 1957), Wratiçāsana (Sharada Rani, 1961), Wrhaspatitattwa (Singhal, 1957), Ganapatitattwa (Singhal, 1958), Tattwājñāna dan Mahājñāna (Singhal, 1962).
- 15) Mungkin untuk jabatan *rake wlahan* ada sinonimnya, yaitu *rake sikhālān* (Casparis, 1956), hlm. 221 - 222).
- 16) Di dalam salah satu prasasti Rakai Walaing pu Kumbhayoni yang berasal dari Bukit Ratu Baka terdapat nama Musalākhyarāstra. Musala berarti "antan", maka mungkin sekali nama itu merupakan sansekertaan dari "daerah Halu". Jadi rupa-rupanya Halu semula bukanlah istilah nama jabatan, melainkan nama daerah (Casparis, 1956, hlm. 342).
- 17) Tentang *saptopapatti* ini periksa karangan F.H. van Naerssen (Naerssen, 1934). Tetapi prasasti-prasasti jaman Majapahit memberikan sembilan nama jabatan *upapatti* itu, sekalipun tidak pernah kesembilan-sembilannya dalam satu prasasti. Sembilan nama jabatan itu ialah *sang pangat i tiruan, manghuri, kañdamuhi, pamwātan, jambi, kañdañan atuha, kañdañan rarai, pañjangjīwa* dan *lekan*.
- 18) Kami merasa ragu apakah kata *deçādhyakṣa* dalam *pañkuratawānatiripadeçādhyakṣān mahāpurusañ* merupakan keterangan bagi *pangkur, tawān* dan *tirip*, atau merupakan *dwandwa* dengannya; dalam hal yang terakhir kompositum itu harus disalin dengan "*pangkur, tawan, tirip dan deçādhyaksa.*" Kami serahkan pemecahannya kepada para ahli bahasa Sansekerta.
- 19) Di Bali *wariga* ialah primbonnya.
- 20) Tentang "wong kalang" itu telah banyak karangan yang ditulis, dan ternyata bahwa di Lombok dan di Kalimantan Barat juga terdapat legenda tentang "wong kalang" itu (Ketjen, 1878; Knebel, 1894; van Eerde, 1902; Agerbeek, 1910; Inggris, 1921; Altona, 1923; Stutterheim, 1935; Adam, 1939; Zwart, 1939; Darmasaraja, 1931).
- 21) Terdapat di dalam prasasti Cane yang berangkat tahun 943 Çaka (OJO., LVIII).
- 22) Terdapat di dalam prasasti Gulung Gulung tahun 851 Çaka (OJO., XXXVIII).
- 23) Di dalam berbagai prasasti kita jumpai *pañdai mas* disamping *pañdai* saja. Mungkin yang dimaksud bukan hanya pandai emas saja (*abdi dalem kemas*), tetapi juga pandai yang lain, seperti pandai besi, pandai perunggu, dan pandai tembaga (*pañdai wsi, pañdai tāmra* dan *pañdai gañca*).
- 24) Istilah *mañlāka* atau *mañlākha* sering disalin dengan "tukang memberi warna merah", sehingga boleh kiranya ditafsirkan sebagai tukang soqa, karena sering disebut seiring dengan *pawdihan*.
- 25) Sebenarnya tidak pasti apakah yang dimaksud di sini ialah abdi yang mengurus gajah dan yang mengurus kuda, atau anggota pengawal istana yang naik gajah dan yang naik kuda (*pasukan berkendaraan gajah dan pasukan berkuda*).

- 26) Tentang para *anambani* itu diperoleh keterangan di dalam prasasti Telang (Stutterheim, 1934) dan prasasti Těrung (Pigeaud, 1960/62, I, hlm. 108 – 112, III, hlm. 156 – 162). Periksa juga karangan F.H. van Naerssen (Naerssen, 1943). Dari keterangan di dalam prasasti-prasasti tersebut jelas bahwa Bengawan Solo dan Kali Brantas memegang peranan yang penting sebagai jalan perhubungan dan perdagangan sejak abad ke-X, dan mungkin sejak lebih awal lagi.
- 27) Kiranya dapatlah difahami bahwa yang terpenting untuk diketahui bukanlah jumlah desanya, melainkan jumlah bermacam jenis tanah (tanah persawahan, tanah tegalan, perkebunan, dll.) yang dapat dibebani pajak. Mungkin pula selama mengadakan perhitungan jumlah desa dan tanah tanah yang dapat dibebani pajak itu para petugas juga mengadakan perhitungan jumlah penduduk. Dengan perkataan lain mungkin pada jaman dahulu sudah ada semacam sensus. Di dalam kitab Nāgarakṛtāgama dikatakan bahwa paman raja Hayam Wuruk, Wijayarājasa atau Bhre Wēngkēr, tahu betul akan keadaan desa desa atau petani petani di seluruh kerajaan (Nag., 4,2.). Jadi rupa-rupanya keterangan tentang jumlah desa, tanah tanah yang dapat dibebani pajak dan jumlah penduduk ada tersimpan di kraton Majapahit, dan urusan itu dikepalai oleh kaum kerabat raja yang terdekat. Adanya perhitungan jumlah desa, tanah tanah dan penduduk itu tentulah untuk keperluan perhitungan pajak (Hollingsworth, 1969, hlm. 42).
- 28) Naskah Āgama itu telah disalin ke dalam bahasa Indonesia oleh Prof. Dr. Slametnoeljana, dengan diubah urutan pasal-pasalnya (Slametnoeljana, 1967).
- 29) Naskah Sārasamuccaya telah diterbitkan dengan terjemahan dan komentar dalam bahasa Inggris oleh seorang sarjana India, dan telah ada pula salinannya ke dalam bahasa Indonesia oleh suatu Panitia di Departemen Agama R.I.
- 30) Jonker, 1885, ps. 219. Beberapa pasal menyebutkan perbedaan hukuman denda yang dikenakan kepada masing-masing kasta. Misalnya seorang *brāhmaṇa* yang memaki-maki seorang *kṣātrya* dendanya lebih besar dari pada kalau ia memaki-maki seorang *waiçya*. Seorang *nīcacaṇḍalajanma* yang memaki-maki seorang *brāhmaṇa* harus dibunuh, dst.
- 31) Di dalam karangannya itu Pigeaud juga menunjuk pada kata *habānan* yang ada di dalam prasasti. Tetapi sebenarnya pembacaan *habānan* itu akibat salah baca untuk *hañānan* sebagai sinonim dari *tawān*. Jadi di dalam prasasti sama sekali tidak "abangan" sebagai pertentangan dari "kaputihan."
- 32) *Rakryān mapatih i hino* sering juga diganti dengan *rakryān mahāmantri i hino*. Bahkan dalam jaman Singhasāri-Majapahit kita hanya menjumpai *rakryān mahāmantri*, sehingga ada istilah *mahāmantri katrīni*, yaitu *hino*, *halu* dan *sirikan*. Jadi tidak pernah ada *rakryān mahāmantri i wka*.
- 33) Antara lain di dalam prasasti Timbanan Wungkal tahun 196 Sañjayawarsa (OJO., XXXV), prasasti Pradah tahun 865 Çaka (OJO., XLVIII), prasasti Muñcang tahun 866 Çaka (OJO., LI), prasasti Wuranduhan A dan Wuranduhan B tahun 869 Çaka (OJO., XLIX dan L), prasasti Turun Hyang A (OJO., LXIV), prasasti Kamalagyan tahun 959 Çaka (OJO., LXI), prasasti Pucanian tahun 963 Çaka (OJO., LXII; Kern, 1917), dll.
- 34) Antara lain di dalam prasasti Sangguran tahun 846 Çaka (OJO., XXXI), prasasti Panggumulan (OJO., XXXIV), prasasti Gulung Gulung tahun 851 Çaka (OJO., XXXVII), prasasti Linggasuntan tahun 851 Çaka (OJO., XXXIX), prasasti Poh Rinting tahun 851 Çaka (OJO., XL), prasasti Jrujru tahun 852 Çaka (OJO., XLIII), prasasti Kampak (OJO., LII), prasasti Kamban tahun 893 Çaka (OJO., LVI), dll.
- 35) Mengingat bahwa di dalam bahasa bahasa Nusantara *ba* dapat berganti dengan *ga*, mungkinkah *wçus gunting* harus disalin dengan "kambing yang sedang bunting"? Tetapi apakah *anggunting rarai* lalu harus disalin dengan "membuntingi atau menyebetuhi anak"? Dan adakah perbedaan antara *anggunting* dan *angjamah* dalam *wñānāndikāñjamahāguntingñāmupuhāñrahana rarai inakwakēn*? Sebab *angjamah* biasa disalin dengan "memperkosa."

- 36) Dengan membandingkan kalimat-kalimat tersebut di atas dengan perumusan di dalam prasasti Kwak I tahun 801 Caka yang berbunyi *ujar hafi kinon rakarayān wka maṅasēakna pasak pasak yathānyan mapagēhha i dlāha ning dlāha* (= kata raja *rakarayān wka* diperintahkan untuk memberikan *pasak pasak* agar supaya (*sīma* itu) "terkukuhkan" sampai "akhir jaman", dan ungkapan-ungkapan di dalam beberapa prasasti yang lain yang menyatakan bahwa pembagian pasak pasak kepada para pejabat itu merupakan bukti bahwa penetapan daerah perdikan itu telah dikukuhkan (*cihnānyan sampun mapagēh kasīmanika ning*), mungkin dapat disimpulkan bahwa *wyawasthā ning manusuk* merupakan keterangan bagi *pasak pasak*.
- 37) Saya mendengar bahwa salah satu naskah tentang arsitektur itu, yaitu naskah *Aṣṭakucali* baru-baru ini menjadi bahan skripsi sarjana salah seorang mahasiswa Jurusan Arkeologi FSUNUD.

Tanjung Bungkal, 25-XI-1975.